



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JANWES NATALMIN HENSREE NAUK
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 953102

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 339.000.000

1. Tanah Seluas 4.37 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, WARISAN Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 493 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/108 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 114.000.000
6. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
8. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 149.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO GT MIO 1KP A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA BR-V Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 35.495.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.659.698
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	551.154.698
III. HUTANG	Rp.	3.680.339
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	547.474.359

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.